BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya di buat harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dengan riil artinya dinyatakan dengan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang berarti secara kasar menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.[1]

Berhasilnya suatu pembangunan oleh suatu Negara atau daerah dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator perekonomian yang ada, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat dipergunakan untuk memperbandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat antar daerah atau Negara dan mengetahui corak pembangunan setiap Negara atau suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Banyak upaya

[1] Robinson Taringan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PT Bumi Askara,2005),46

yang dilakukan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan namun hasilnya masih belum menampakkan hasil yang optimal. Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah *pro-poor*.[2]

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[3]

Kemiskinan itu sendiri bersifat multidiemensial. Artinya, karena kebutuhan manusia bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan

---

[2] Chairul Nizar dkk, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 1 No. 2, Mei 2013.

[3] Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 59.

gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.[4]

Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk dalam salah satu indikator pembangunan suatu Negara di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Pembangunan ekonomi suatu Negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahun meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonominya meningkat.[5]

Pertumbuhan ekonomi adalah kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.[6]

Selain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut para ahli ekonomi peningkatan upah minimum

---

[4] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 299.

[5] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 12.

[6] I Made Parwata dkk, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan", e-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol. 4 Tahun 2016, 2.

dipercaya dipercaya meningkatkan standar kehidupan buruh, mengurangi kemiskinan, mendorong perusahaan lebih efisien, sekaligus menciptakan efek beruntun lewat peningkatan konsumsi ke peluang kerja baru. Peningkatan upah minimum juga akan menguramgi beban pemerintah untuk biaya jaminan sosial akibat turunnya kelompok miskin yang disubsidi. Upah yang semakin tinggi mendorong banyak orang memasuki pasar kerja formal dibandingkan bekerja di sektor informal dan illegal, dan terutama mempercepat penghapusan kebijakan buruh murah menuju kebijakan buruh layak.[7]

Banten menarik diperhatikan karena Banten merupakan provinsi yang baru berdiri dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 secara admistratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.[8]

Karena sebagian wilayah Banten mengalami pemekaran, sehingga terjadi adanya variasi tingkat kemiskinan antara Kabupaten dengan Kota, maka diperlukan analisa kembali agar dapat diketahui perbendaan kondisi dan perkembangan kemiskinan terutama factor-faktor PDRB dan upah minimum yang bisa mempengaruhi naik turunnya kemiskinan di Kabupaten/Kota tersebut, untuk kemudian bisa diambil kebijakan-

[7] Ari Widiastuti, "Analisi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008", https://scholar.google.co.id (diunduh tanggal 15 oktober 2019)

[8] http://bantenprov.go.id/read/program-kerja.html diunduh tanggal 15 oktober 2019.

kebijakan yang tepat agar perbedaan angka kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten bisa dikurangi.

Table 1.1

Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dalam (Persen) 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	9,50	10,43	9,67	9,74	9,61
Kab Lebak	9,17	9,97	8,71	8,64	8,41
Kab Tangerang	5,26	5,71	5,29	5,39	5,18
Kab Serang	4,87	5,09	4,58	4,63	4,30
Kota Tangerang	4,91	5,04	4,94	4,95	4,76
Kota Cilegon	3,81	4,10	3,57	3,52	3,25
Kota Serang	5,70	6,28	5,58	5,57	5,36
Kota Tangeran Selatan	1,68	1,69	1,67	1,76	1,68
Provinsi Banten	5,51	5,9	5,42	5,45	5,25

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Provinsi Banten, presentase kemiskinan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 dan 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya , sedang pada tahun 2014, 2016, dan 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari data yang dipaparkan diatas, bahwa data pada presentasi kemiskinan di Provinsi Banten mengalami perubahan di setiap tahunnya. Maka perlu diketahui apa masalah yang terjadi di setiap daerah di provinsi Banten agar factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum yang nantinya bisa diambil kebijakan yang tepat supaya angka kemiskinan dapat berkurang setiap tahunnya.

Dengan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan karya ilmiah dengan judul **"Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2018".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan bahwa sesuai dengan keadaan di provinsi Banten, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun kenaikan tersebut tidak diiringi dengan penurunan kemiskinan. Yang terjadi adalah angka kemiskinan di provinsi Banten terus mengalami fluktuasi yang tidak menentu.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian dan kemampuan penulis dalam hal meneliti, pembatasan masalah ini bertujuan

agar pembahasan tidak meluas , maka penulis hanya membataskan penulisannya hanya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum dan Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2018.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun 2014-2018 ?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun2014-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulisan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahu pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun2014-2018.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

   Sebagai pengalaman yang cukup berharga bagi peneliti untuk mengimplementasikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian sekaligus menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan pada

kondisi yang sebenarnya serta menjadi bahan pertimbangan untuk meneliti lebih lanjut.

2. Bagi Akademik

   Sebaai tambahan bagi pembaca untuk bahan acuan mengenai topik penelitian ini, dan dapat menambah pengetahuan baru dibidang Ekonomi Syari'ah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh variable-variabel pembangunan ekonomi, variable tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan).[9]

Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering di jumpai hampir seluruh Negara di dunia. Permasalahan yang terjadi pun memiliki karakteristik yang hampir sama dimana kemiskinan yang tinggi terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau sebuah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi.[10]

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan suatu masalah yang sangat berhubungan dengan jumlah penduduk miskin.

---

[9] Pratama Raharja, Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Edisi Ke-3(Jakarta: Fajultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 294.

[10] Ari Widodo, *Perencanaan Pembangunan*: Aplikasi Komputer (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006), 132

Dimana PDRB sebagai indikator penting untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentuatau dengan kata lain ukuran ini menunjukan kemampuan berproduksi suatu daerah secara agregat dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya.

Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

PDRB dan upah minimum merupakan variabel independen, sedangkan kemiskinan merupakan variabel dependen. Variabel tersebut akan diregsesikan dan diharapkan akan mendapatkan tingkat signifikasi variabel independen dalam mempengaruhi variabel depemden. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel tersebut diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji masalah PDRB, upah minimum dan kemiskinan di provinsi Banten dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat membantu dalam menentukan kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dari penejelasan di atas dapat digambarkan pengaruh PDRB dan upah minimum terhadap kemiskinan dalam suatu kerangka pemikiran seperti berikut:

Gambar 1.1

Kerangka pemikiran

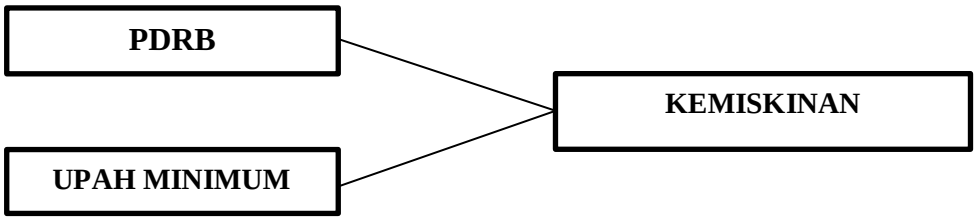

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran dari keseluruhan karya ilmiah atau skripsi ini, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penulis. Dalam sistematika pembahasan ini penulis membagi kedalam lima bab, yaitu:

Bab kesatu berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan **teori** tentang PDRB, Upah minimum ,kemiskinan, Hipotesis, dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu.

Bab ketiga berisi uraian mengenai: Tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, jenis dan sumber data, jenis metode penelitian, operasiional variabel penelitian.

Bab keempat ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian menggunakan statistik SPSS yaitu uji asumsi

kllasik yaitu: Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Linear Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi, dan Hipotesis Statistik.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.